

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN PEBAYURAN KABUPATEN BEKASI

Shintya Purnamasari¹, Hanny Purnamasari², Ani Nurdiani Azizah³

Shintya Purnamasari, shintyapurnamasari561@gmail.com, 081296782887, Universitas Singaperbangsa Karawang¹
Hanny Purnamasari, hanny.purnamasari@fisip.unsika.ac.id, 085716311812, Universitas Singaperbangsa Karawang²
Ani Nurdiani Azizah, ani.nurdiani@fisip.unsika.ac.id, 0811949682, Universitas Singaperbangsa Karawang³

Abstract

The *Family Hope Program* (PKH) is a conditional cash social assistance program that given to *poor families* (KM) who have been designated as *beneficiary families* (KPM). This study aims to determine the implementation of the *Family Hope Program* (PKH) policy in Pebayuran District. In this study using a descriptive method with a qualitative approach. Sources of data used are primary data and secondary data obtained through observation, interviews, and literature study. The theory used by the author is the theory of Implementation According to George C. Edward III (1980) as a reference for conducting an analysis consisting of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results of the research, the implementation of the *Family Hope Program* (PKH) Policy in Pebayuran District, Bekasi Regency is well established between facilitators and KPM. The assistant can carry out his duties well and patiently in dealing with several characteristics of KPM. The human resources involved in the *Family Hope Program* (PKH) have been patient in assisting *Beneficiary Families* (KPM) in utilizing accessibility to education, healthy services, and providing counseling to KPM to develop their skills amidst the limitations of their education.

Keywords: Policy Implementation, Family Hope Program (PKH). Pebayuran District

Abstrak

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial tunai bersyarat yang diberikan kepada Keluarga Miskin (KM) yang sudah ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat (KPM). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jalannya implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Pebayuran. Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Teori yang digunakan penulis ialah teori Implementasi Menurut George C. Edward III (1980) sebagai acuan untuk melakukan analisis yang terdiri dari komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil dari penelitian, Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi terjalin dengan baik antar pendamping dan KPM. Sumberdaya manusia yang terlibat dalam Program Keluarga Harapan (PKH) telah sabar mendampingi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memanfaatkan aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, dan memberikan penyuluhan kepada KPM untuk mengembangkan keahlian yang mereka miliki ditengah-tengah keterbatasan pendidikannya.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Program Keluarga Harapan (PKH), Kecamatan Pebayuran

1. LATAR BELAKANG

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan yang ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan penyaluran program perlindungan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Pemerintah melalui Kementerian Sosial memiliki salah satu program untuk menanggulangi kemiskinan yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). PKH merupakan program pemberian Bantuan Sosial tunai bersyarat kepada keluarga miskin (KM) yaitu ditunjuk sebagai penerima PKH. PKH di Indonesia sudah dimulai sejak Tahun 2007 tersebar di 7 Provinsi dan pada Tahun 2018, PKH telah diterapkan pada 34 Provinsi yang meliputi 512 Kabupaten/Kota.

PKH sebagai program bersyarat telah terbuka bagi keluarga miskin, khususnya ibu hamil dan anak-anak. Sehingga mereka dapat menggunakan berbagai fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pendidikan yang ada disekitarnya. Saat ini, dengan menjaga tingkat kesejahteraan sosial, manfaat PKH juga mencakup penyandang disabilitas dan lansia. Sesuai ketentuan yang berlaku, Kemensos sudah membentuk Unit Pengelolaan Program Keluarga Harapan (UPPKH) yang diberada ditingkat pusat atau daerah.

PKH mulai dilaksanakan di kabupaten Bekasi pada tahun 2013 dan hanya 19 Kecamatan yang mendapatkan bantuan. Seiring berjalannya waktu PKH sudah mulai menyebar di 23 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bekasi. Menurut data BPS jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bekasi dari tahun 2016-2020 bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Bekasi
Tahun 2016 – Tahun 2020

	Tahun	
--	-------	--

2016	2017	2018	2019	2020
164.410	163.950	157.210	149.430	189.300

Sumber: Website bekasikab.bps.go.id

Tabel diatas dapat membuktikan bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bekasi mengalami penurunan dari tahun 2016-2019, namun pada tahun 2020 terjadi peningkatan yang cukup signifikan yaitu mencapai 189.300 atau meningkat 4,82%.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan dengan Kasi Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi yaitu RT yang memegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) KPM, banyak KPM yang tidak mengerti cara menggunakan kartu tersebut, terdapat beberapa KPM yang menolak dikeluarkan dari PKH padahal kenyataannya perekonomian peserta KPM sudah membaik, dan ditemukannya data ganda.

2. METODE

Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Adapun tehnik pengumpulan data yang dilakukan peneliti meliputi: Penelitian lapangan dan Studi kepustakaan. Penelitian lapangan ini dilaksanakan melalui 2 teknik yaitu wawancara dan observasi. Peneliti melakukan wawancara dengan Kasi Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial selaku Sekretaris UPPKH di Kabupaten Bekasi, para pendamping PKH di Kecamatan Pebayuran, dan KPM PKH. sedangkan untuk observasi adalah ketika peneliti langsung turun kelapangan untuk mengumpulkan data dan mengamati bagaimana keadaan dilapangan. Sedangkan studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dari buku, artikel, pasal-pasal yang menjelaskan tentang implementasi kebijakan PKH.

3. HASIL

3.1 Definisi Implementasi Kebijakan Menurut George C. Edward III

Implementasi kebijakan adalah suatu proses yang krusial, karena sebagus/sebaiknya kebijakan jika tidak dipersiapkan secara matang untuk diimplementasikan, maka tujuan tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Begitu sebaliknya, sebaik apapun rencana implementasi kebijakan, Maka dari itu, supaya dapat mencapai suatu tujuan kebijakan, perlu disiapkan semaksimal mungkin untuk perumusan Implementasi kebijakan. Model implementasi menurut Edward III memiliki empat variabel yang saling terkait, yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

3.2 Definisi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Pebayuran

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah bantuan sosial tunai bersyarat yang diberikan pada keluarga miskin yang sudah ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. Sebagai Program bansos bersyarat, PKH juga memungkinkan akses untuk ibu hamil dan anak sekolah untuk menggunakan fasilitas pendidikan dan kesehatan di sekitarnya. Penyandang disabilitas dan lansia juga dapat merasakan manfaat PKH. Tujuan dari PKH yaitu supaya mengangkat taraf hidup KPM melalui fasilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, berkurang beban pengeluaran, memberikan perubahan perilaku, meningkatkan kemandirian keluarga penerima manfaat, serta mengurangi kemiskinan.

Supaya dapat mencapai tujuan tersebut, harus ada perangkat pendukung berupa kelembagaan dan sumber daya manusia untuk mensukseskan program tersebut, salah satunya adalah koordinator/pendamping yang mengetahui langsung tentang situasi di lapangan. Untuk menjadi pendamping dalam PKH, harus memiliki gelar sarjana. Tugas utama pekerja sosial PKH adalah membantu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk menggunakan layanan pendidikan dan kesehatan. Standar penerima adalah ibu hamil/menyusui, anak 0-6 tahun, siswa SD, anak siswa SMP, anak siswa SMA, anak usia 6-21 Tahun (belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun), lansia, dan penyandang disabilitas.

Besaran bantuan sosial PKH pada tahun 2020. Besaran bantuan pada setiap komponen berbeda-beda. Terdapat tujuh komponen bantuan yang terdapat pada program PKH yaitu:

No	Komponen Bantuan	Indeks Bantuan (Rp.) / Tahun
1.	Kategori Ibu Hamil/Nifas	Rp 2.400.000
2.	Kategori Anak Usia 0 s.d. 6 Tahun	Rp 2.400.000
3.	Kategori Pendidikan Anak SD/Sederajat	Rp 900.000
4.	Kategori Pendidikan Anak SMP/Sederajat	Rp 1.500.000
5.	Kategori Pendidikan Anak SMA/Sederajat	Rp 2.000.000
6.	Kategori Penyandang Disabilitas Berat	Rp 2.400.000
7.	Kategori Lanjur Usia	Rp 2.400.000

Gambar 1. Indeks Besaran Bantuan Sosial PKH

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, 2020

Kecamatan Pebayuran yaitu salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Letak Kecamatan Pebayuran berbatasan dengan Kabupaten Karawang. Berdasarkan tingkat pemanfaatan ruang, sebanyak 80% wilayah Kecamatan Pebayuran adalah pertanian. Mayoritas penduduk di subkawasan Pebayuran bergantung pada sektor pertanian untuk mata pencahariannya sebagai buruh tani.

Jumlah penerima PKH pada tahun 2020 sebanyak 78.287 orang yang berada di 23 Kecamatan di Kabupaten Bekasi, salah satunya adalah Kecamatan Pebayuran yang akan menjadi lokasi penelitian. Berikut data yang diperoleh peneliti mengenai jumlah penerima PKH di Kecamatan Pebayuran.

Tabel 3: Total Penerima PKH/Desa di Kecamatan Pebayuran Tahun 2020

No	Desa	Total KPM
1	Bantarjaya	1084
2	Bantarsari	619
3	Karangharja	883
4	Karanghaur	149
5	Karangjaya	779
6	Karangpatri	798
7	Karangreja	826
8	Karangsegar	457
9	Kertajaya	572
10	Kertasari	577
11	Sumberreja	335
12	Sumbersari	600
13	Sumberurip	404
Total		8083

Sumber: Pendamping PKH Kabupaten Bekasi

Menurut data diatas, Kecamatan Pebayuran yang memiliki 13 desa, seluruhnya dapat merasakan manfaat dari bantuan PKH. Desa Bantarjaya merupakan desa yang paling banyak total KPM PKH dengan jumlah 1084 KPM dan desayang paling sedikit mendapatkan bantuan PKH berada di Desa Karanghaur sebanyak 149 KPM.

4. PEMBAHASAN

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan sesuatu yang paling penting dalam setiap hal. Apalagi dalam menyukseskan jalannya implementasi kebijakan sebuah program untuk meneruskan pesan-pesan kesemua pihak yang terlibat. Dalam memberikan informasi harus yang akurat dan konsisten. Penyampaian informasi yang

dilakukan oleh pihak UPPKH dan pendamping dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dijalin dengan baik, walaupun pada kondisi covid 19 tidak meluluhkan semangat para pendamping. Begitupun komunikasi pendamping dengan KPM, pendamping rutin setiap minggu datang ke setiap desa yang berada di Kecamatan Pebayuran untuk melaksanakan P2K2 dan menanyakan kepada KPM kendala apa saja yang sedang di hadapi. Seperti permasalahan yang sedang terjadi yaitu KPM yang tidak mengerti cara menggunakan KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) karena keterbatasan pengetahuan, disitu pendamping harus sangat sabar untuk memberi arahan cara menggunakannya. Jika tetap tidak mengerti KKS bisa dipegang oleh wanita dewasa di dalam satu Kartu Keluarga (KK).

2. Sumberdaya

Ketika menjalankan implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumberdaya, apalagi sumberdaya manusia. Sumberdaya manusia pada program keluarga harapan di Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi meliputi: UPPKH, Koordinator Kabupaten, Koordinator Kecamatan. semua pendamping PKH harus memiliki pendidikan sarjana. Tupoksi pendamping PKH adalah untuk mendampingi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memanfaatkan aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, dan memberikan penyuluhan kepada KPM untuk mengembangkan keahlian yang mereka miliki ditengah-tengah keterbatasan pendidikannya. Kegunaan penyuluhan tersebut untuk membuka pemikiran para KPM supaya tidak bergantung pada bantuan sosial PKH, karena mereka tidak selamanya akan mendapatkan bantuan. Dinas Sosial melalui pendamping PKH saat ini sedang mencari tahu para KPM yang hidupnya sudah sejahtera untuk dikeluarkan dari bantuan PKH. melalui tehnik MPA, pendamping memberi arahan kepada para KPM dan memfasilitasi KPM untuk mengidentifikasi situasi-situasi KPM pada saat ini, apakah mereka masih pantas mendapatkan bantuan PKH. tujuan memakai tehnik MPA yaitu supaya membuka fikiran para KPM dan mau untuk dikeluarkan dari bantuan yang selama ini mereka dapatkan. Karena terdapat kasus KPM yang hidupnya sudah sejahtera

dan sudah tidak mempunyai salah satu komponen yang menjadi syarat sebagai KPM PKH tetapi tidak mau dikeluarkan. Penggunaan tehnik MPA terus dilakukan, mengingat kasus kemiskinan yang semakin banyak.

3. Disposisi

Sikap serta komitmen UPPKH dan pendamping sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan PKH. Tanpa adanya sikap dan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan PKH di Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi, program tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Variabel ini sangat memuat banyak harapan dari UPPKH ataupun pendamping. Semua berharap supaya tujuan dari PKH bisa dicapai. Pada program ini walaupun sudah mendapatkan bantuan, para KPM tetap diberikan pendampingan. Dinas Sosial dan Koordinator selalu mengadakan Monitoring dan Evaluasi yang diharuskan KPM menghadiri acara tersebut, gunanya supaya bisa mengetahui permasalahan apa yang terjadi dan Unit Pelaksana dapat menemukan jalan keluar dari permasalahan tersebut.

4. Struktur Birokrasi

Tugas dan fungsi pendamping PKH yaitu bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksana kegiatan P2K2. Pendamping sebisa mungkin melaksanakan tugasnya sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, seperti mengecek apakah KPM telah memeriksakan kehamilannya bagi ibu hamil ke pelayanan kesehatan. Dalam hal ini bisa kita lihat bahwa struktur birokrasi pada PKH dalam implementasinya sudah sesuai dengan SOP, tetapi masih terdapat beberapa KPM yang tidak komitmen pada hak dan kewajibannya.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Komunikasi, sudah terjalin dengan baik antara UPPKH Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, Koordinator Kabupaten, Koordinator Kecamatan dan KPM di Kecamatan

Pebayuran. Koodinator Kecamatan rutin setiap minggu menjalankan tugasnya untuk menyampaikan P2K2 kepada KPM.

Sumberdaya, sumberdaya manusia yang terlibat didalam PKH telah sabar mendampingi KPM dalam memanfaatkan aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, dan memberikan penyuluhan kepada KPM untuk mengembangkan keahlian yang mereka miliki ditengah-tengah keterbatasan pendidikannya.

Disposisi, UPPKH dan para pendamping sangat berperan dalam menyukseskan jalannya PKH maka di butuhkan pendamping yang baik dan amanah untuk mengutas kemiskinan di Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi.

Struktur Birokrasi, pada Program Keluarga Harapan (PKH) khususnya di Kecamatan Pebayuran dalam implementasinya telah sesuai dengan SOP, tetapi masih terdapat beberapa KPM yang tidak komitmen pada hak dan kewajibannya.

Saran

Dari penjabaran hasil penelitian dan pembahasan yang sudah tertera diatas dari implementasi kebijakan PKH di Kecamatan Pebayuran, peneliti mengemukakan beberapa saran, dapat meningkatkan kewajiban_kewajiban dalam kegiatan PKH, pendamping harus lebih ekstra memberikan pendampingan atau penyuluhan hak dan kewajiban apa yang seharusnya dipenuhi oleh para KPM supaya program PKH dapat berjalan dengan lancar.

6. DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Bhinadi, Ardito. (2017). Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Deepublish.

Kemensos. (2019). Pedoman Pelaksanaan PKH

Taufiqurokhman. (2015). Pandeglang Dalam Implementasi Kebijakan Peningkatan IPM. *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers)*, 53(9), 1689–1699.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

WEBSITE:

Badan Pusat Statistik. [Bekasikab.bps.go.id](https://bekasikab.bps.go.id). (2019). Jumlah Masyarakat Miskin di kabupaten Bekasi, dari <https://bekasikab.bps.go.id/indicator/23/429/1/jumlah-penduduk-miskin-di-kabupaten-bekasi.html>

Hidayat, Anwar. (2012). Pengertian Penelitian Kualitatif Menurut Ahli, dari

[https://www.statistikian.com/2012/10/penelitian-](https://www.statistikian.com/2012/10/penelitian-kualitatif.html#:~:text=Menurut%20Sugiyono%20(2011)%2C%20metode,sampel%20sumber%20data%20dilakukan%20secara)

[kualitatif.html#:~:text=Menurut%20Sugiyono%20\(2011\)%2C%20metode,sampel%20sumber%20data%20dilakukan%20secara](https://www.statistikian.com/2012/10/penelitian-kualitatif.html#:~:text=Menurut%20Sugiyono%20(2011)%2C%20metode,sampel%20sumber%20data%20dilakukan%20secara)